

MIGRASI KULTURAL BURUH MIGRAN INDONESIA ASAL NUSA TENGGARA TIMUR KE MALAYSIA.

NOR ZANA BINTI MOHD AMIR

Migrasi merupakan sebuah fenomena tradisi yang terjadi di seluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia maupun di Malaysia. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas politik / negara ataupun batas administrasi / batas bagian dalam suatu negara.¹ Migrasi terbagi atas dua kategori yaitu migrasi dalam negeri (intern), dan migrasi internasional. Migran masuk dan migran keluar adalah mereka yang masuk ke dalam atau keluar dari suatu populasi penduduk tertentu selama periode waktu tertentu.² Migrasi internasional adalah seseorang yang melintasi perbatasan negara dapat melakukannya dengan ikut perpindahan masal (perpindahan sejumlah penduduk dengan ciri-ciri etnis atau sosial yang sama), atau sebagai pribadi, atau anggota kelompok keluarga kecil.³ Migrasi internasional dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi.

Migrasi internasional menjadi salah satu pilihan penduduk Indonesia untuk mencari mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan serta perekonomian keluarga. Migrasi internasional yang dilakukan oleh penduduk di Indonesia banyak dijalankan secara kultural / swadaya. Mereka bermigrasi secara kultural atau swadaya dengan kemauan, keinginan, dan biaya sendiri. Migrasi internasional secara kultural sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan sebelum wujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dari sebelum dan sesudah zaman kejayaan kerajaan yang ada

¹ Muhammad Yasin, et.al., *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: kerjasama Penerbit Salemba Empat dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), hlm. 133.

² Elspeth Young, *Migrasi dalam Pengantar Kependudukan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 97.

³ *Ibid*, hlm. 99.

di Nusantara. Sejarah mencatat, basis budaya maritim di Nusantara mengantarkan berbagai etnis seperti Bugis, Bawean, Sasak, Aceh, Melayu, Madura, dan Flores untuk menentang ganasnya lautan menuju tanah pengharapan terutama di sub kontinen Asia Tenggara.⁴ Aktivitas perdagangan antarpulau dan internasional terutama di beberapa pelabuhan penting di Nusantara semakin meningkatkan mobilitas penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan.

Namun seiring berjalannya waktu, mobilitas tenaga kerja Indonesia antarpulau dan luar negeri selalu dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan Orde Lama, dan Orde Baru, bahkan dari pemerintahan Belanda pada tahun 1887. Pada tahun tersebut, tenaga kerja dikirim ke beberapa daerah jajahan seperti Suriname, Kaledonia, dan Belanda.⁵ Pengiriman tenaga kerja pada masa pemerintahan Belanda hanya dijadikan sebagai alat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pemerintah kolonial di Hindia-Belanda. Demi mewujudkan kepentingan dari pemerintah kolonial, banyak buruh Hindia-Belanda dikirim ke negara penerima tenaga kerja.

Indonesia telah mengintegrasikan dirinya pada perekonomian dunia sejak lahirnya pemerintahan rezim Orde Baru yang diketuai oleh Presiden Soeharto. Pada awalnya, migrasi tenaga kerja masih belum dilirik sebagai penopang ekonomi. Hal ini karena, sumber daya minyak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan mulai tumbuh menjadi proses industrialisasi. Migrasi tenaga kerja yang terjadi pada saat itu masih berjalan secara kultural atau swadaya di kalangan penduduk. Namun pada tahun 1983, menyusul jatuhnya harga minyak dunia, pemerintah membangun perekonomian berbasiskan tenaga kerja murah dan memulai sebuah program mengekspor tenaga kerja.

⁴ Wahyu Susilo, *Budaya Migrasi dan Budaya Migran*, Makalah disampaikan dalam Sanskerta Seminar Nasional, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 11 Mei 2016.

⁵ Awani Irewati, *Kebijakan Indonesia Terhadap Masalah TKI di Malaysia* dalam edisi Awani Irewati, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI Ilegal di Negera ASEAN*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003), hlm. 34.

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan yang diminati oleh buruh migran Indonesia. Pemilihan tersebut berdasarkan pada jarak tempuh yang dekat dan kultur yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Apalagi sejak dahulu memang sudah ada perlintasan batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan, perorangan, dan tradisional hingga tahun 1980-an. Namun pada tahun 1984, melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan aliran migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 1984. Perjanjian tersebut kemudiannya dikenal sebagai *Medan Agreement* yang merupakan penerapan pengaturan sekali gus pengawasan arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.⁶ Dengan adanya perjanjian tersebut, pola migrasi tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya dilakukan secara kultural atau swadaya, namun juga sudah ada keterlibatan pihak pemerintah dan swasta yaitu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Walaupun sudah mempunyai akses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga swasta, namun eksistensi migrasi secara kultural masih menjadi pilihan bagi buruh migran Indonesia, dan salah satunya buruh migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 566 pulau besar dan kecil. Antaranya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote dan Pulau Alor. Iklim daerah NTT termasuk tropis kering dengan musim kemarau yang cukup panjang, yaitu sekitar 8 bulan per tahun dengan penyebaran curah hujan yang tidak merata. Kondisi iklim tersebut menyebabkan kurang suburnya sebagian lahan pertanian yang terdapat di NTT.

⁶Riwanto Tirtosudarmo, *Dimensi Politik Migrasi Internasional: Indonesia dan Negara Tetangga* dalam edisi M, Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999), hlm. 151.

Kebanyakan buruh migran NTT memilih untuk bermigrasi dan menjadi tenaga kerja ke Malaysia. Faktor jarak, bahasa dan budaya yang tidak terlalu berbeda dengan Indonesia menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan utama para buruh migran. Antara motif buruh migran NTT ke Malaysia adalah faktor ekonomi, lapangan pekerjaan, dan budaya. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan konstruksi. Wilayah tumpuan buruh migran asal NTT lebih banyak tertumpu di Malaysia Timur berbanding dengan Malaysia Barat. Tiga jalur lintas batas yang dapat digunakan oleh buruh migran Indonesia untuk bermigrasi ke Malaysia. Salah satu jalur lintas batas yang digunakan oleh buruh migran NTT adalah dengan melewati jalur Nunukan Kalimantan Timur. Dari Nunukan, buruh migran NTT akan masuk ke wilayah Malaysia dengan konsentrasi aktivitas di Negara Bagian Sabah.⁷

Pemilihan migrasi secara kultural banyak diambil oleh para buruh migran asal NTT dikarenakan mereka menyusul keluarga yang terlebih dahulu bermigrasi ke Malaysia. Migrasi jenis ini juga dikenali sebagai migrasi berantai. Bagi masyarakat NTT dalam memandang migrasi ke luar negeri adalah sebuah tradisi turun-temurun. Hal ini karena, jika ibu dan ayah mereka sebelumnya pernah menjadi tenaga kerja Indonesia, maka mereka akan mengikuti jejak langkah orang tuanya. Terdapat juga anak muda yang memilih untuk merantau ke luar negeri setelah tergiur dengan cerita “indah” tentang tanah perantauan.⁸

Para calon buruh migran asal NTT terutama yang ada di Desa Lewohedo yang memilih bermigrasi secara kultural atau swadaya, di mana mereka terlebih dahulu perlu mengurus

⁷Jannes Eudes Wawa, *Irono Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 48.

⁸Waihali Larantuka, *Orang Lewohedo Masih Setia Dengan Tradisi Migrasi Swadaya*, <http://waihali-larantuka.blogspot.co.id/2013/03/orang-lewohedo-masih-setia-dengan.html>, (diakses tanggal 5 Oktober 2016, jam 15.14 WIB).

kelengkapan administrasi dan dokumen seperti kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan kartu keluarga untuk mendapatkan surat keterangan meninggalkan desa. Surat keterangan tersebut diperoleh di kantor Pemerintah Desa. Mereka bermigrasi ke Malaysia dengan menggunakan paspor kunjungan. Selama berada di sana mereka berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan bantuan dari teman maupun keluarga. Setelah itu mereka baru akan mengurus segala dokumen dan kelengkapan administrasi untuk permohonan permit kerja. TKI yang mempunyai dokumen yang resmi dan bekerja di Malaysia inilah yang dikenali dengan buruh migran *documented*.

Selain buruh migran *documented* ada juga buruh migran *undocumented*. Buruh migran *undocumented* di Malaysia dikenali sebagai pendatang haram tanpa izin (PATI). Hampir setiap tahun dilakukan razia dan pendeportasian bagi PATI khususnya dari Indonesia. Fakta di lapangan mencatat bahwa terdapat segelintir masyarakat NTT yang meninggalkan desa secara diam-diam alias tidak mengurus segala surat kelengkapan administrasi di kantor Pemerintah Desa setempat. Mereka beralasan bahwa segala dokumen dan kelengkapan administrasi tersebut tidak akan berlaku apabila mereka mengurus paspor di Nunukan.⁹ Kebanyakan dari mereka yang tidak mengurus dokumen tersebut akan menggunakan jasa calo untuk mengurus kelengkapan administrasi dikarenakan dikira lebih efektif, mudah, dan cepat. Adapun buruh NTT yang bermigrasi secara kultural dengan menggunakan paspor kunjungan akan dicap ilegal jika mereka bekerja tanpa dokumen yang resmi, atau mereka tidak bisa menunjukkan dokumen disaat ditangkap oleh petugas kepolisian dan keimigrasian di Malaysia.

Keinginan dan ketertarikan mereka untuk bermigrasi secara kultural atau swadaya perlu dikawal. Hal ini karena, migrasi sejenis ini berpotensi akan menjadi kasus *trafficking* jika tidak

⁹*Ibid.*,

dikawal. Beberapa minggu terakhir, kasus *trafficking* terutama yang berasal dari NTT sering terpapar di dada akhbar. Agen setempat akan mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dan buku paspor. Semua biaya ditanggung oleh agen. Pengurusan segala dokumen dan identitas tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini karena, wujudnya akses dan jaringan antara calo dengan oknum petugas dari instansi pemerintahan yang berkaitan.¹⁰ Inilah awal dari kasus *human trafficking* yang banyak terjadi di Indonesia. Mereka akan dipekerjakan di Malaysia dengan menggunakan visa atau paspor kunjungan dan disalurkan kepada beberapa agen atau oknum di negara tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat antara jumlah korban terbesar perdagangan manusia yaitu 5,29%.¹¹ Pemberitaan mengenai kasus perdagangan orang sempat disiarkan di Koran Tempo pada tanggal 29 Agustus 2016, di mana Kepolisian Resor Kupang NTT telah melakukan penangkapan terhadap 13 tersangka perdagangan orang. Komplotan tersebut memiliki jaringan yang bekerja dari calo atau perekrut hingga pembuat identitas palsu. Hal yang mengagetkan adalah berdasarkan pengakuan para perekrut yang ada di Kabupaten Kupang pernah menukar 20 TKI dengan satu mobil Xenia.¹² Ironisnya, keterlibatan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dalam kasus pemerdagangan manusia. Kepolisian Nusa Tenggara Timur telah mengamankan GM, oknum pegawai imigrasi diduga berperan terkait dengan penerbitan paspor untuk tenaga kerja Indonesia (TKI).

Di samping itu, peningkatan pengurusan dokumen palsu seperti kartu tanda penduduk, akte kelahiran dan lain-lain di Indonesia maupun di Malaysia. Pemalsuan dokumen tersebut sangat tinggi terutama apabila para buruh migran mengurus kelengkapan administrasi paspor dan permit kerja. Seorang saja bisa memiliki kartu tanda penduduk melebihi satu dengan nama,

¹⁰Jannes Eudes Wawa, *Op.Cit*, hlm. 48.

¹¹*Human Trafficking dan Terlukanya Kemanusiaan*, Media Indonesia, 30 Agustus 2016.

¹²Rezki Alvionitasari, Yohanes Seo, dan Antara, *Perdagangan Orang: Belum Semua Sindikat Terungkap*, Tempo, 29 Agustus 2016.

tanggal lahir, dan alamat yang berbeda. Bahkan, pekerja yang baru berusia belasan tahun pun dinaikkan usianya menjadi 25 tahun. Hal ini karena, Malaysia telah mensyaratkan bahwa setiap pekerja yang ingin bekerja di negara tersebut harus berusia minimal 25 tahun.¹³ Pengurusan dokumen palsu juga terjadi di Malaysia di mana ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan permit kerja bahkan kartu tanda penduduk (kad pengenalan) palsu. Ketertarikan buruh migran Indonesia untuk menerima penawaran dari oknum tersebut adalah memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini karena, kebanyakan majikan yang menawarkan pekerjaan kepada buruh migran harus mempunyai dokumen. Selain itu, mereka akan “terselamatkan” dari incaran para petugas kepolisian dan keimigrasian.

Selain itu, wujudnya masalah dokumen dan status kewarganegaraan terutama sekali kepada anak BMI yang menikah di perantauan. Mereka menikah “di bawah tangan” sesama buruh migran Indonesia atau buruh migran asing lainnya atau penduduk lokal. Kebanyakan anak yang dilahirkan di Malaysia tidak memiliki akte kelahiran atau sijil kelahiran dikarenakan buruh migran tersebut menikah “di bawah tangan”. Adapun yang memiliki akte kelahiran bisa menempuh pendidikan sampai sekolah dasar (SD) saja. Hal ini karena, untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah salah satunya diperlukan kartu tanda penduduk di Malaysia. Anak BMI terkadang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat tersebut dikarenakan kendala pengurusan KTP. Permasalahan tersebut biasanya diselesaikan dengan membawa anak mereka pulang ke Indonesia atau “mengadopsikan” anak mereka kepada penduduk lokal agar anak mereka mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia.

¹³Jannes Eudes Wawa, *op.cit.*, hlm 48-49.

Dampak lain dari migrasi kultural atau swadaya jika tidak dikawal arusnya adalah salah satunya dapat memberikan citra negatif kepada negara. Mengapa migrasi kultural dapat memberikan citra negatif kepada negara? TKI yang bermigrasi secara kultural di Malaysia sangat berpotensi menjadi buruh migran *undocumented*. Mereka biasanya memilih untuk menamatkan visa kunjungan setelah pertama kali datang atau setelah beberapa kali melakukan pembaruan pengecapan visa kunjungan dengan keluar ke Indonesia dari Malaysia. Alasan mereka memilih untuk menamatkan visa kunjungan atau tidak mengurus permit kerja adalah dikarenakan menelan biaya yang sangat besar sehingga penghasilan yang dapat mereka simpan di tabungan sangat sedikit. Mereka inilah akhirnya dilabelkan oleh pemerintah Malaysia sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI). Mereka biasanya ditahan dan ditangkap di tempat kerja karena tidak mempunyai dokumen kerja yang sah. Mereka juga dikatakan telah mengundang pelbagai masalah yang mengancam kesejahteraan dan kepentingan umum. Mereka ditahan dan ditangkap dikarenakan kasus kriminal seperti merampok, membunuh, mencopet, penyeludupan dan pengedaran narkoba.¹⁴

Kesimpulannya, migrasi kultural atau swadaya memiliki perjalanan sejarah yang panjang terutama bagi penduduk Indonesia ke Malaysia. Dari catatan sejarah, orang Bugis, Jawa, Minang dan beberapa etnis yang ada di Indonesia sudah memiliki penempatan dan kekuasaan dalam pemerintahan di Malaysia. Migrasi kultural juga menjadi pilihan kebanyakan buruh migran asal NTT. Peningkatan arus migrasi ke luar negeri khususnya masyarakat NTT menyebabkan beberapa permasalahan timbul seperti *human trafficking*, pemalsuan dokumen, dan lain-lain. Berbagai kasus yang berkaitan dengan TKI/TKW/ buruh migran baik di dalam negeri maupun di

¹⁴Rusniah Ahmad, Mohamed Naim Ajis, dan Saadon Awang, *Permasalahan Pendatang Asing Tanpa Izin di Malaysia dari Aspek Sosial dan Perundangan*, Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 Kanun(2), hlm. 6.

luar negara memberikan rasa simpati dan empati kepada masyarakat Indonesia umumnya. Penyelesaian masalah, penegakan hukum serta memperjuangkan hak bagi buruh migran diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang berkaitan.

Daftar Pustaka

Buku

- Awani Irewati. 2003. *Kebijakan Indonesia Terhadap Masalah TKI di Malaysia* dalam edisi Awani Irewati. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI Ilegal di Negara ASEAN*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Elspeith Young. 1995. *Migrasi dalam Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jannes Eudes Wawa. 2005. *Irono Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mohammad Yasin, et.al. 2010. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Salemba Empat dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riwanto Tirtosudarmo. 1999. *Dimensi Politik Migrasi Internasional: Indonesia dan Negara Tetangga* dalam edisi M, Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation.

Jurnal dan Makalah

- Rusniah Ahmad, Mohamed Naim Ajis, dan Saadon Awang, *Permasalahan Pendatang Asing Tanpa Izin di Malaysia dari Aspek Sosial dan Perundangan*, Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 26 Kanun(2).
- Wahyu Susilo, *Budaya Migrasi dan Budaya Migran*, Makalah disampaikan dalam Sanskerta Seminar Nasional, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 11 Mei 2016.

Surat Kabar

- Rezki Alvionitasari, Yohanes Seo, dan Antara, *Perdagangan Orang: Belum Semua Sindikat Terungkap*, Tempo, 29 Agustus 2016.
- Human Trafficking dan Terlukanya Kemanusiaan*, Media Indonesia, 30 Agustus 2016.

Website

- Waihali Larantuka, *Orang Lewohedo Masih Setia Dengan Tradisi Migrasi Swadaya*, <http://waihali-larantuka.blogspot.co.id/2013/03/orang-lewohedo-masih-setia-dengan.html>, (diakses tanggal 5 Oktober 2016, jam 15.14 WIB).